

INVESTASI PENDIDIKAN MEMUTUS RANTAI KEMISKINAN DI SULAWESI SELATAN

Bayu Rhamadani Wicaksono¹, Muhammad Aliem²

¹Graduate School of Economics, Ritsumeikan University, Japan

²Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Universitas Hasanuddin

¹gr0441kr@ed.ritsumeikan.ac.jp; ²m.aliem@unhas.ac.id

Diterima: Juni 2020; Disetujui: Desember 2020

Abstract. *The development in all sectors is being intensively carried out by the regional government for the community welfare, including in the scope of South Sulawesi Province. The development is not only in monumental forms, such as infrastructures, but also building human resources, such as investment in education sector. The education investment is expected to be able to break the chain of poverty that is still shackling. This study aims to analyze the relationship between education and poverty in South Sulawesi. The data used are data from 24 districts/municipalities in South Sulawesi 2017-2019 analyzed using panel data regression with the Random Effects Model (REM) and the results are as follows. The variables of Gross Enrollment Rate (GER) in high school and literacy rate have a negative and significant effect on poverty rate in South Sulawesi. Meanwhile, the variable of Net Enrollment Rate (NER) in high school has a negative but not significant effect on poverty rate in South Sulawesi. Hopefully, the government can continue the good policies in education sector, so it can give the community equal opportunities to access education.*

Keywords: *education, gross enrollment ratio, investment, literacy rate, net enrollment ratio, poverty rate.*

Abstraksi. *Pembangunan di segala lini sedang gencar dilakukan oleh pemerintah daerah demi kesejahteraan rakyat, termasuk di ruang lingkup Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak hanya dalam bentuk monumental, seperti bangunan infrastruktur, namun juga membangun sumber daya manusia, seperti investasi di sektor pendidikan. Investasi pendidikan diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan yang masih membelenggu. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan pendidikan dan kemiskinan di Sulawesi Selatan. Data yang digunakan adalah data 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan tahun 2017-2019 yang dianalisis menggunakan regresi data panel dengan Random Effects Model (REM) dan hasilnya sebagai berikut. Variabel Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA sederajat dan Angka Melek Huruf (AMH) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan. Sedangkan variabel Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA sederajat memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan. Pemerintah diharapkan dapat melanjutkan kebijakan di sektor pendidikan yang telah berjalan dengan baik sehingga dapat memberikan kesempatan yang sama kepada penduduk untuk mengakses pendidikan.*

Kata Kunci: *angka melek huruf, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, investasi, kemiskinan, pendidikan.*

PENDAHULUAN

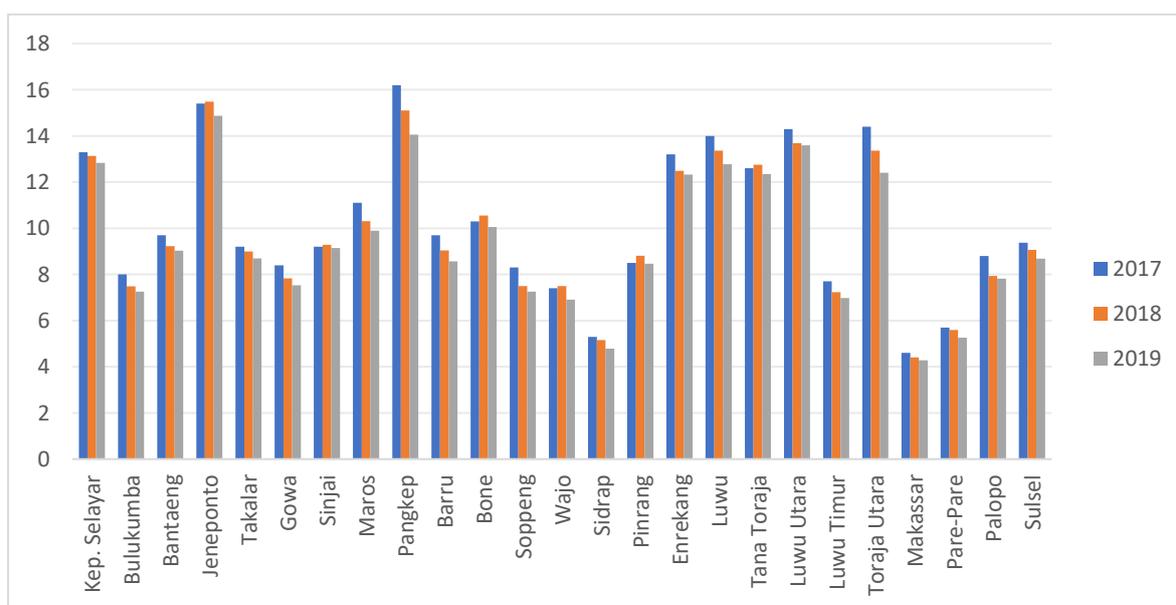
Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab

pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemerintah Republik Indonesia, 2003). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus mengupayakan program wajib belajar 12 tahun dapat terlaksana dengan baik melalui pelaksanaan

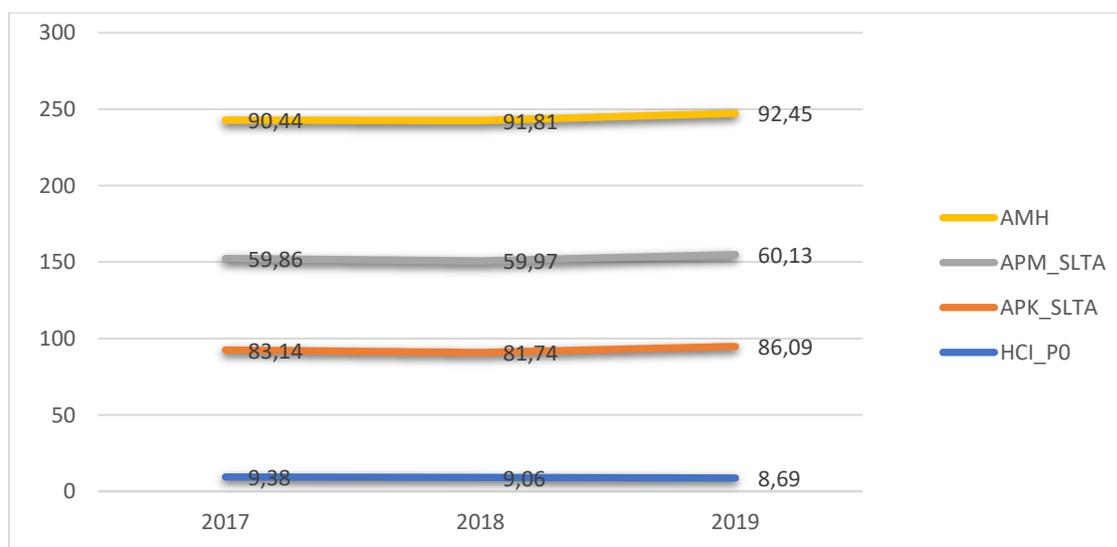
Program Indonesia Pintar (PIP). Hal ini diperkuat dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 dimana Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Negara, dan Kepala Pemerintah Daerah untuk berkontribusi maksimal agar implementasi PIP dapat berjalan dengan baik (Setiawan, 2016).

Pembangunan di segala lini sedang gencar dilakukan oleh pemerintah daerah demi kesejahteraan rakyat, termasuk di ruang lingkup Provinsi Sulawesi Selatan. Pembangunan bukan hanya dilakukan dalam bentuk monumental, seperti bangunan infrastruktur, namun juga membangun sumber daya manusia dalam rangka pengentasan buta huruf di Sulawesi Selatan yang telah berjalan baik selama beberapa tahun, seperti anggaran pendidikan minimal 20 persen di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Program Paket C, dan program pendidikan gratis yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009. Contoh kebijakan daerah lainnya

adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 (Pemkab Gowa, 2013) yang mengatur implementasi berbagai macam inovasi dalam bidang pendidikan, seperti Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) dengan tidak ada siswa yang tinggal kelas, yang berdampak pada persentase penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa yang cukup signifikan yaitu 0,59 persen pada 2018 dan 0,3 persen pada 2019 (BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2019). Berbagai inovasi dimunculkan untuk menjadikan Kabupaten Gowa sebagai kabupaten pendidikan pertama di Sulawesi Selatan yang diharapkan dapat menjadi kabupaten percontohan bagi kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan pada khususnya dan kabupaten/kota seluruh Indonesia pada umumnya (Humas Pemkab Gowa, 2019b). Tak ayal Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa berhasil menyabet beragam penghargaan, salah satunya penghargaan Anugerah Kihajar 2019 dari Kemendikbud (Humas Pemkab Gowa, 2019a).



Gambar 1. Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan 2017-2019
 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2020



Gambar 2. Data Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA Sederajat, Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA Sederajat, Angka Melek Huruf (AMH), dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2020

Berdasarkan Gambar 1, penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan terlihat jelas pada gambar di atas. Terdapat 18 kabupaten/kota yang tingkat kemiskinannya konsisten turun pada periode 2017-2019. Enam kabupaten diantaranya mengalami kenaikan pada 2018 dan turun lagi pada tahun 2019, yakni Kabupaten Jeneponto, Sinjai, Bone, Wajo, Pinrang, dan Tana Toraja.

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Beberapa indikator digunakan sebagai *proxy* kemiskinan di Indonesia, salah satunya adalah *Head Count Index* (HCI-P₀), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).

Gambar 2 menunjukkan kenaikan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sederajat serta Angka Melek Huruf (AMH) pada tahun 2017-2019 di Provinsi Sulawesi Selatan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu, berapapun umurnya, terhadap jumlah penduduk kelompok umur tertentu. Indikator APK digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Selain itu, APK juga merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk umur sekolah di masing-masing jenjang pendidikan (SD sederajat, SLTP sederajat, dan SLTA sederajat).

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Indikator APM digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Selain itu, APM juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia

sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya (SD sederajat, SLTP sederajat, dan SLTA sederajat).

Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis, baik huruf latin dan atau huruf lainnya. Indikator AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan penduduknya agar dapat memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran.

Peningkatan ketiga indikator tersebut memiliki makna terjadinya perbaikan kualitas penduduk Sulawesi Selatan di bidang pendidikan selama tiga tahun terakhir. Pada periode yang sama terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 9,38 persen di tahun 2017 menjadi 8,69 persen di tahun 2019.

Investasi di bidang pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang manfaatnya baru dirasakan setelah puluhan tahun. Meskipun begitu, investasi ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan yang masih membelenggu sebagian penduduk di Sulawesi Selatan. Pembangunan sektor pendidikan merupakan pengembangan *human capital* dalam penuntasan kemiskinan (Jeffrey Sachs, 2005 dalam Ustama, 2006). Pendapat seorang filosofis, Amartya Sen juga mengemukakan pemberantasan kemiskinan melalui jalur pendidikan di mana pendidikan mempunyai fungsi sebagai *human resources* yaitu mengembangkan kemampuannya dalam memasuki era kehidupan baru seperti

kompetitif dan *employability* (H.A.R. Tilaar, 2000 dalam Atmanti, 2005).

Penelitian tentang pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan telah banyak dilakukan. Ustama (2006) menyatakan bahwa pendidikan menjadi instrumen paling efektif untuk memotong rantai kemiskinan di Indonesia. Atmanti (2005) juga menyatakan pentingnya investasi di bidang pendidikan karena dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi dalam rangka memutus rantai kemiskinan. Wiguna (2013) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2010. Majid (2014) menemukan bahwa rendahnya tingkat pendidikan di sebagian kabupaten/kota di Aceh menyebabkan tingkat kemiskinan sangat tinggi mencapai 20 persen. Dapat disimpulkan bahwa tingkat dan mutu pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Aceh. Hal ini juga sejalan dengan penelitian lain di Aceh yang menyatakan bahwa dalam jangka panjang variabel pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan (Rahmawati, 2019). Perbaikan mutu pendidikan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di level regional, Jawa Timur (Putrizahrah, 2019). Tingkat pendidikan juga terbukti dapat menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan di level nasional, Indonesia periode 2012-2017 (Pahlawan & Ratna, 2018).

Sektor pendidikan menjadi harapan bagi pemerintah daerah di ruang lingkup Sulawesi Selatan untuk memutus rantai kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kemiskinan dan pendidikan di Sulawesi Selatan tahun 2017-2019. Variabel pencapaian pendidikan yang akan diteliti adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA sederajat, Angka Partisipasi

Murni (APM) SLTA sederajat, dan Angka Melek Huruf (AMH). Hipotesis yang akan diuji di dalam penelitian ini adalah: 1) Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA sederajat memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan; dan 2) Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA sederajat memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan; dan 3) Angka Melek Huruf (AMH) memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan.

Besar harapan penulis bahwa hasil penelitian yang disajikan dapat mendatangkan manfaat bagi banyak pihak. Pertama, bagi pemerintah dan *stake holder* terkait selaku pemangku kebijakan sehingga kebijakan yang ditetapkan, khususnya sektor pendidikan, dapat memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, bagi para akademisi sebagai tambahan ilmu pengetahuan mengenai hubungan pendidikan dan kemiskinan. Ketiga, bagi peneliti sebagai referensi dalam perbaikan dan penyempurnaan penelitian selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Sumber Data dan Variabel

Variabel yang diteliti sebagai variabel bebas adalah Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Melek Huruf (AMH). Sejalan dengan program wajib belajar 12 tahun, maka data APK dan APM SLTA sederajat yang digunakan dalam penelitian ini.

Head Count Index (HCI-P₀) atau persentase penduduk miskin sebagai variabel terikat. Keseluruhan sumber data untuk 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dan definisi operasional variabel berasal dari buku publikasi Badan Pusat Statistik (BPS).

Metode Analisis

Analisis deskriptif dan analisis inferensia digunakan sebagai metode analisis dalam penelitian ini. Analisis deskriptif adalah metode sederhana yang biasa digunakan untuk memberikan gambaran umum dan deskripsi objek berdasarkan data dan informasi yang tersedia.

Analisis inferensia yang diaplikasikan untuk menganalisis pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan tahun 2017-2019 adalah analisis regresi data panel. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan *software* EViews 10. Model regresi yang digunakan sebagai berikut.

$$HCI_{it} = \alpha + \beta_1 APK_{it} + \beta_2 APM_{it} + \beta_3 AMH_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- HCI : *Head Count Index* (HCI-P₀) atau persentase penduduk miskin
- APK : Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA sederajat (persen)
- APM : Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA sederajat (persen)
- AMH : Angka Melek Huruf (AMH) atau persentase penduduk yang melek huruf
- i* : Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan urutan ke-*i*
- t* : Periode penelitian (2017-2019)
- α : Intersep
- β : Koefisien dari setiap variabel independen
- ε_{it} : *Error term*

Menurut Baltagi (2005), tahapan prosedur analisis regresi data panel adalah:

1. Spesifikasi model
 Spesifikasi model dapat dibentuk berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga variabel dependen dan variabel independen dapat ditentukan.

2. Identifikasi model

Terdapat tiga model dalam regresi data panel, yaitu *Common Effects Model* (CEM), *Random Effects Model* (REM), dan *Fixed Effects Model* (FEM). Diperlukan pemilihan model terbaik dengan menerapkan Uji *Chow*, Uji *Hausman*, dan Uji *BP-LM*.

3. Uji asumsi klasik

Setelah model terbaik diperoleh, langkah berikutnya adalah melakukan serangkaian uji asumsi klasik. Ada empat jenis asumsi klasik yang harus terpenuhi, yaitu normalitas, non-multikolinieritas, homoskedastisitas, dan non-autokorelasi.

4. Uji signifikansi model

Setelah model yang dipilih memenuhi semua uji asumsi klasik, uji signifikansi harus dilakukan. Uji signifikansi menggunakan uji-t, uji-F, dan *adjusted R²*.

5. Interpretasi model

Setelah semua tahapan dilakukan, langkah terakhir adalah melakukan interpretasi atau menjelaskan model yang telah terpilih. Penjelasan didasarkan pada teori-teori yang telah diajukan. Selain itu, penjelasan juga ditambahkan dengan membandingkan penelitian-penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Penelitian ini menggunakan variabel *Head Count Index* (HCI- P_0) atau persentase penduduk miskin sebagai variabel dependen. Variabel Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA sederajat, Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA sederajat, dan Angka Melek Huruf (AMH) sebagai variabel independen. Statistik deskriptif dari variabel-variabel yang dianalisis tersaji pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1, jumlah data yang diteliti dari seluruh variabel adalah 288 data.

Variabel HCI terdiri dari 72 data dengan nilai minimum 4,28 (Kota Makassar 2019); nilai maksimum 16,20 (Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2017); nilai rata-rata 9,84; dan standar deviasi 3,13. Variabel APK SLTA sederajat terdiri dari 72 data dengan nilai minimum 61,06 (Kabupaten Kepulauan Selayar 2018); nilai maksimum 110,74 (Kota Palopo 2019); nilai rata-rata 83,95; dan standar deviasi 9,49. Variabel APM SLTA sederajat terdiri dari 72 data dengan nilai minimum 48,85 (Kabupaten Tana Toraja 2017); nilai maksimum 72,62 (Kabupaten Sinjai 2017); nilai rata-rata 60,42; dan standar deviasi 6,24. Variabel AMH terdiri dari 72 data dengan nilai minimum 82,38 (Kabupaten Jeneponto 2017); nilai maksimum 98,40 (Kota Palopo 2019); nilai rata-rata 90,95; dan standar deviasi 3,76.

Pada variabel HCI- P_0 , angka kemiskinan terendah di Kota Makassar dan tertinggi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Penyebab kemiskinan di Kabupaten Pangkep disinyalir karena banyaknya warga yang tinggal di wilayah kepulauan dengan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang terbatas.

Pada variabel APK SLTA sederajat, nilai terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Selayar. Artinya, partisipasi sekolah siswa SLTA sederajat di Kabupaten Selayar masih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara APK SLTA sederajat di Kota Palopo sebesar 110,74. Nilai yang melebihi 100 menandakan bahwa banyak penduduk yang menamatkan pendidikan SLTA sederajat di luar *range* usia yang ditentukan, yakni tamat SLTA sederajat lebih dari 18 tahun atau sebelum usianya genap 18 tahun.

Tabel 1.
Statistik Deskriptif Variabel

<i>Variabel</i>	<i>N</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Dev.</i>
HCI	72	4,28	16,20	9,84	3,13
APK	72	61,06	110,74	83,95	9,49
APM	72	48,85	72,62	60,42	6,24
AMH	72	82,38	98,40	90,95	3,76

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan (diolah), 2020

Analisis inferensia dalam studi ini mengaplikasikan analisis regresi data panel. Tahapan prosedur yang dilalui seperti tersaji berikut ini.

Spesifikasi Model

Model regresi data panel digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017-2019. Terdapat tiga kemungkinan model estimasi regresi data panel, yaitu *Common Effects Model* (CEM), *Random Effects Model* (REM), dan *Fixed Effects Model* (FEM). Cara memperoleh model yang terbaik adalah dengan melakukan Uji *Chow*, Uji *Hausman*, dan Uji *Breusch-Pagan Lagrange Multiplier*.

Tabel 2.
Hasil Uji *Chow*

<i>Effects Test</i>	<i>Prob.</i>
Cross-section F	0,0000
Cross-section Chi-square	0,0000

Sumber: Output EViews 10, 2020

Identifikasi Model

Uji *Chow* dilakukan untuk memilih model antara FEM dan CEM. Hasil Tabel 2 menunjukkan nilai probabilitas mendekati 0,000 sedangkan nilai alpha 0,05 sehingga hasilnya tolak H_0 . Maka, regresi panel FEM lebih baik dibandingkan CEM.

Uji *Hausman* dilakukan untuk memilih model antara REM dan FEM. Hasil Tabel 3 menunjukkan nilai probabilitas 0,3685 sedangkan nilai alpha 0,05 sehingga hasilnya tidak tolak H_0 . Maka, regresi panel REM lebih baik dibandingkan dengan FEM. Dari hasil uji *Chow* dan uji *Hausman* diperoleh hasil bahwa model REM lebih baik daripada model FEM dan CEM sehingga Uji *Breusch-Pagan Lagrange Multiplier* tidak perlu dilakukan.

Uji Asumsi Klasik

Setelah mendapatkan model REM sebagai model terbaik, maka tahapan berikutnya adalah melakukan uji asumsi klasik. Terdapat empat jenis asumsi klasik yang harus terpenuhi, yaitu normalitas, non-multikolinieritas, homoskedastisitas, dan non-autokorelasi.

Tabel 3.
Hasil Uji *Hausman*

Test Summary	Chi-sq. Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section random	3,153868	3	0,3685

Sumber: Output EViews 10, 2020

Uji Normalitas

Salah satu cara untuk melakukan uji normalitas adalah dengan membandingkan nilai probabilitas dari Jarque-Bera. Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa nilai probabilitas 0,126460 lebih besar dari alpha 0,05. Hal ini menyiratkan hasil bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

Tabel 4.
Hasil Uji Normalitas

Description	Value
Number of Observations	72
Jarque-Bera	4,135655
Probability	0,126460

Sumber: Output EViews 10, 2020

Uji Multikolinearitas

Dari Tabel 5 terlihat bahwa tidak adanya multikolinearitas karena koefisien korelasi

Tabel 5.
Hasil Uji Multikolinearitas

	HCI	APK	APM	AMH
HCI	1,000000	-0,080777	-0,169979	-0,402032
APK	-0,080777	1,000000	0,635412	0,417637
APM	-0,169979	0,635412	1,000000	0,336572
AMH	-0,402032	0,417637	0,336572	1,000000

Sumber: Output EViews 10, 2020

Tabel 6.
Hasil Olah Data Estimasi *Random Effects Model*

Variable	Coefficient	Prob.	Description	Value
C	25,46600	0,0000	<i>R-squared</i>	0,990258
APK	-0,023900	0,0281	<i>Adj. R-squared</i>	0,984630
APM	-0,048355	0,2314	<i>Prob(F-statistic)</i>	0,000000
AMH	-0,117595	0,0013	<i>Durbin-Watson stat</i>	2,129734

Sumber: Output EViews 10, 2020

antar variabel independen kurang dari 0,80. Hal ini menunjukkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat korelasi antar sesama variabel independen. Selain itu, koefisien korelasi antara variabel independen dan variabel dependen juga kurang dari 0,80. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi timbal balik antara variabel independen dan variabel dependen.

Uji Heteroskedastisitas

Model yang terpilih dalam penelitian ini adalah *Random Effects Model* (REM), maka pengujian heteroskedastisitas dapat dikatakan telah selesai. Menurut Greene dalam Isdiana & Aminata (2019), metode REM dengan *Generalized Least Square* (GLS) dapat mengatasi adanya pelanggaran heteroskedastisitas yang terjadi dalam model terpilih.

Uji Autokorelasi

Salah satu cara untuk menguji autokorelasi adalah melihat nilai Durbin-Watson (D-W). Jika nilai D-W mendekati 2, maka memenuhi asumsi tidak adanya autokorelasi. Nilai Durbin-Watson pada Tabel 6 adalah 2,129734 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

Uji Signifikansi Model

Berdasarkan hasil Tabel 6, nilai *adjusted R²* sebesar 0,984630. Hal ini menunjukkan bahwa variabel APK SLTA sederajat, APM SLTA sederajat, dan AMH dapat menjelaskan 98,463 persen variasi dari tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan periode 2017-2019. Sedangkan sisanya sebesar 1,537 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak tercakup dalam model. Nilai probabilitas statistik uji *F* mendekati nilai 0,000000 sedangkan nilai probabilitas kurang dari alpha 0,05. Sehingga model persamaan regresi yang dibangun layak digunakan untuk mengestimasi variabel dependen, yaitu tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Berdasarkan nilai probabilitas dari statistik uji *t* dapat diambil kesimpulan bahwa variabel APK SLTA sederajat dan AMH secara parsial signifikan memengaruhi tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan dengan nilai probabilitas berturut-turut 0,0281 dan 0,0013 dimana nilai probabilitas lebih kecil dari alpha 0,05. Sedangkan variabel APM SLTA sederajat secara parsial tidak signifikan memengaruhi tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan dengan nilai probabilitas 0,2314 dimana nilai probabilitas lebih besar dari alpha 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa keberartian model yang diperoleh sudah cukup baik sehingga dapat dilanjutkan ke tahap analisis

dan interpretasi. Persamaan yang diperoleh adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} HCI_{it} = & 25,46600 - 0,023900 \text{ APK}_{it} \\ & - 0,048355 \text{ APM}_{it} - 0,117595 \text{ AMH}_{it} \\ & \dots\dots\dots (2) \end{aligned}$$

Interpretasi Model

Pengaruh Angka Partisipasi Kasar (APK) terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis, variabel APK SLTA sederajat memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan. Jadi, hasil penelitian sesuai dengan hipotesis dan teori yang menyatakan bahwa semakin meningkat APK, maka semakin menurun persentase penduduk miskin. Hasil ini sejalan dengan penelitian Majid (2014) dimana variabel APK berdampak negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh dan penelitian Khoirudin (2019) dimana variabel APK memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

Partisipasi sekolah di jenjang pendidikan SLTA sederajat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini bisa dilihat dari pencapaian APK SLTA sederajat yang menunjukkan bahwa animo penduduk semakin meningkat untuk menyelesaikan pendidikan tanpa dibatasi ketentuan usia sekolah. Hal ini menunjukkan fakta adanya peningkatan daya serap penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SLTA sederajat. Sehingga membuka secercah harapan bagi penduduk tamatan SLTA sederajat untuk memiliki peluang lebih baik dalam memperbaiki kesejahteraan keluarganya.

Pengaruh Angka Partisipasi Murni (APM) terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis, variabel APM SLTA sederajat memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan. Jadi, hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis dan teori yang menyatakan bahwa semakin meningkat APM, maka secara signifikan dapat menurunkan persentase penduduk miskin. Namun, hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dimana variabel APM tidak berdampak signifikan terhadap persentase penduduk miskin, baik yang terjadi pada 6 provinsi di Pulau Jawa (Nirwana, 2013) maupun di Provinsi DKI Jakarta (Amaliah, 2015).

Data BPS menunjukkan bahwa APM anak sekolah pada jenjang pendidikan SLTA sederajat selama beberapa tahun terakhir semakin membaik (BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2019b). Meskipun nilai APM SLTA sederajat belum mencapai 100 dimana menunjukkan partisipasi sekolah anak SLTA sederajat yang ditinjau dari ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikan SLTA sederajat masih rendah. Semakin tinggi usia anak sekolah, semakin rendah partisipasi sekolahnya. Hal ini berkaitan dengan fasilitas pendidikan seperti ketersediaan bangunan sekolah untuk SLTA sederajat yang lebih sedikit dibandingkan SD maupun SLTP.

Pengaruh Angka Melek Huruf (AMH) terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis, variabel AMH memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan. Jadi, hasil penelitian sesuai dengan hipotesis dan teori yang menyatakan bahwa semakin meningkat AMH, maka semakin menurun persentase penduduk miskin. Hasil ini sejalan dengan penelitian Dore & Jolianis (2014) dimana variabel AMH memiliki pengaruh negatif dan signifikan

terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat dan penelitian Majid (2014) dimana variabel AMH berdampak negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Aceh.

Berdasarkan data BPS hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), sebagian besar penduduk 15 tahun ke atas yang masih buta aksara berada pada kelompok usia 60 tahun ke atas atau kelompok lanjut usia, yaitu sebesar 29,06 persen. Sementara itu, kelompok dewasa dan remaja masing-masing sebesar 5,75 persen dan 0,32 persen. Artinya, mayoritas kelompok produktif sudah mampu membaca dan menulis sehingga dapat memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan pengetahuan dan *skill*. Program pengentasan buta huruf di Sulawesi Selatan terbukti ampuh dengan terjadinya kenaikan AMH atau dengan kata lain buta aksara cenderung menurun pada proporsi usia 15 tahun ke atas dari tahun ke tahun (BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2019b).

SIMPULAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh indikator pendidikan (APK, APM, dan AHM) daerah terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan tahun 2017-2019. Hal ini tentunya sejalan dengan tujuan pemerintah dimana investasi pendidikan diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan. Berdasarkan analisis inferensia menggunakan regresi data panel *Random Effects Model* (REM), diperoleh hasil penelitian sebagai berikut. Pertama, variabel APK SLTA sederajat memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan. Kedua, variabel APM SLTA sederajat memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan. Ketiga, variabel AMH

memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disampaikan implikasi dan rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah. Pertama, pemerintah dapat melanjutkan kebijakan yang telah berjalan dalam rangka pengentasan buta huruf di Sulawesi Selatan, seperti kebijakan pendidikan gratis, anggaran pendidikan minimal 20 persen di APBD, dan Program Paket C sehingga dapat memberikan kesempatan yang sama kepada penduduk untuk mengakses pendidikan. Kedua, jika kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Selatan

dapat menerapkan kebijakan seperti di Kabupaten Gowa, Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) dengan misi tidak ada siswa tinggal kelas, maka indikator APK, APM, dan AMH diharapkan dapat meningkat dengan catatan tetap menjaga kualitas siswa.

Penelitian ini hanya menggunakan variabel APK SLTA sederajat, APM SLTA sederajat, dan AMH periode 2017-2019. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menambah periode waktu penelitian dan menambah variabel indikator pendidikan lainnya, seperti Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, D. (2015). Pengaruh Partisipasi Pendidikan terhadap Persentase Penduduk Miskin. *Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 2(3), 231–239. Retrieved from <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/Faktor/article/viewFile/595/561>
- Atmanti, H. D. (2005). Investasi Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan. *Dinamika Pembangunan*, 2(1), 30–39. Retrieved from <http://eprints.undip.ac.id/16864/>
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan. (2019). *Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan 2017-2019*. (Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Ed.). Makassar: BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Retrieved from <https://sulsel.bps.go.id/publication/>
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan. (2019). *Statistik Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 2017-2019*. (Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Ed.). Makassar: BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Retrieved from <https://sulsel.bps.go.id/publication/>
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data (Third Edition)*. England: John Wiley & Sons, Ltd.
- Dores, E., & Jolianis. (2014). Pengaruh Angka Melek Huruf dan Angka Harapan Hidup terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat. *Journal of Economic and Economic Education*, 2(2), 126–133. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/55056-ID-none.pdf>
- Humas Pemkab Gowa. (2019a). Gowa, Satu-satunya di Sulsel Terima Anugrah Kihajar 2019. Retrieved from <https://humas.gowakab.go.id/tag/gowa-raih-penghargaan-kihajar/>

- Humas Pemkab Gowa. (2019b). Gowa Siap Jadi Kabupaten Pendidikan. Retrieved from <https://humas.gowakab.go.id/gowa-siap-jadi-kabupaten-pendidikan/>
- Isdiana, F. N., & Aminata, J. (2019). Analisis Ekspor Indonesia dengan Anggota APEC melalui Moda Transportasi Laut. *Diponegoro Journal of Economics*, 1(1), 130–145. Retrieved from <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje/article/download/3802/2401>
- Khoirudin, A. (2019). *Analisis Hubungan Kausalitas antara Kemiskinan dan Pendidikan di Negara Indonesia Tahun 1996-2017*. Universitas Negeri Semarang. Retrieved from <https://lib.unnes.ac.id/37554/>
- Majid, M. S. A. (2014). Analisis Tingkat Pendidikan dan Kemiskinan di Aceh. *Jurnal Pencerahan*, 8(1), 15–37. Retrieved from <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JPP/article/view/2040/2000>
- Nirwana, I. D. (2013). Pengaruh Variabel Pendidikan terhadap Persentase Penduduk Miskin (Studi pada 33 Provinsi di Indonesia, 6 Provinsi di Pulau Jawa, dan 27 Provinsi di Luar Pulau Jawa Pada Tahun 2006-2011). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(2), 1–17. Retrieved from <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/291>
- Pahlawan, P. Y., & Ratna. (2018). The Effect of Education Level, Unemployment Rate and Economic Growth on Poverty Rate in Indonesia 2012-2017 Period. *Journal of Maliksussaleh Public Economics Volume*, 1(2), 44–49. Retrieved from <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jompe/article/download/882/pdf>
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003). Indonesia. Retrieved from <http://simkeu.kemdikbud.go.id/index.php/peraturan/1/8-uu-undang-undang/12-uu-no-20-tahun-2003-tentang-sistem-pendidikan-nasional>
- Pemkab Gowa. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2013 tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (2013). Indonesia. Retrieved from <http://gowakab.go.id/wp-content/uploads/PERDA-NOMOR-10-TAHUN-2013-TTG-SISTEM-KELAS-TUNTAS-BERKELANJUTAN.pdf>
- Putrizahrah, A. (2019). Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, dan Jumlah Wanita yang Bekerja terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(2), 1–11. Retrieved from <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5813>
- Rahmawati, N. F. (2019). *Pengaruh Pendidikan dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Aceh*. Universitas Syiah Kuala. Retrieved from https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=59894
- Setiawan, Y. (2016). Kemdikbud Upayakan Wajib Belajar 12 Tahun Melalui PIP. Retrieved from <https://psmk.kemdikbud.go.id/konten/1906/kemdikbud-upayakan-wajib-belajar-12-tahun-melalui-pip>

- Ustama, D. D. (2006). Peranan Pendidikan dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 1–12. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/download/417/297>
- Wiguna, V. I. (2013). Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(2), 1–32. Retrieved from <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/647/590>